

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan maka dapat disimpulkan bahwa Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Periode 2020-2022 Berdasarkan analisis rasio keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun 2020-2022, perkembangan keuangan daerah menunjukkan banyak aspek yang kurang memuaskan. Sebagian besar rasio, seperti varians pendapatan daerah, rasio ketergantungan keuangan, dan kemandirian keuangan, berada pada kategori yang sangat rendah atau kurang baik, menandakan Kabupaten Timor Tengah Selatan memiliki ketidakmampuan daerah untuk mengandalkan sumber pendapatan lokal dan ketergantungan yang tinggi pada transfer dari pemerintah pusat. Meskipun ada beberapa rasio yang menunjukkan hasil positif, seperti efektivitas pajak daerah dan pertumbuhan belanja, hal ini tidak cukup untuk mengimbangi kinerja buruk yang ditunjukkan oleh rasio-rasio lainnya. Selain itu, pertumbuhan siLPA yang negatif dan penerimaan pembiayaan yang hanya bergantung pada siLPA semakin memperburuk keadaan. Secara keseluruhan, kinerja keuangan Kabupaten Timor Tengah Selatan perlu perbaikan signifikan agar dapat menciptakan kemandirian dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah.

## 6.2 Saran

1. Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan harus menyusun strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak dan retribusi, agar tingkat ketergantungan terhadap pendapatan transfer semakin rendah dan tingkat kemandirian, penyelenggaraan desentralisasi serta pertumbuhan pendapatan semakin meningkat.
2. Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan harus menyusun rencana yang baik dan terkendali agar pertumbuhan belanja selalu cenderung naik dan stabil.
3. Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan harus meningkatkan belanja modal dan belanja langsung agar kualitas *output* semakin baik.
4. Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan harus meningkatkan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan untuk membantu mengatasi keterbatasan dana yang dimiliki pemerintah.
5. Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan harus memperbaiki aspek kelembagaan/pengelolaan pendapatan asli daerah, peningkatan jumlah wajib pajak, penciptaan sumber-sumber pendapatan baru dan kebijakan di bidang investasi, melibatkan pihak swasta dengan stimulan yang menarik untuk menanamkan investasinya ke daerah dan menarik investor dengan didukung oleh birokrasi yang mudah dan infrastruktur yang mendukung, menciptakan iklim dunia usaha yang kondusif.